



Guru Menjauh dari Semangat 45

INI MASA HARI GURU
Setiap tahun, Indonesia memperingati Hari Guru Nasional pada 25 November.

KI Hadjar Dewantara

1912 Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) didirikan pada 1912 dan beranggotakan kepala sekolah, guru bantu, dan guru desa. Corak PGHB makin nasionalis seiring makin kentanya kesadaran tentang Indonesia.

1931 PGHB berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Ini menandai cita-cita tentang Indonesia sudah bulat.

1945 24-25 November 1945 PGI menggelar Kongres Guru di Surakarta, Jawa Tengah. Hasilnya adalah menghapuskan perbedaan suku, ras, agama, dan politik demi satu Indonesia. Pada 25 November 1945, Kongres membentuk PGRI.

Pemerintah menetapkan hari lahir PGRI sebagai Hari Guru Nasional.

Sumber: PGRI dan JRI 1912
Grafis: Harian Jogja/Mengki Irawan

JOGJA—Indonesia baru saja memperingati Hari Guru Nasional pada Minggu (25/11). Guru kini seolah menjauh dari semangat Kongres Guru Pertama yang diadakan 75 tahun lalu.

Bernadetha Dian Saraswati,
Abdul Hamid Razak & Sunartono
redaksi@harianjogja.com

Pada 24-25 November 1945, Persatuan Guru Indonesia (PGI) menggelar Kongres di Surakarta, Jawa Tengah. Salah satu keputusan penting dalam persamuhan tersebut adalah menghapuskan perbedaan suku, ras, agama, dan politik, demi

- ▶ Penelitian PPIM UIN Jakarta juga mengambil sampel 32 guru di DIY, tetapi Pemda mengklaim DIY bebas guru intoleran.
- ▶ Pelajaran agama lebih banyak ketimbang Pancasila sehingga guru tidak terlatih bersikap toleran.

Indonesia. Di hari terakhir Kongres, peserta membentuk Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Pemerintah kemudian menetapkan hari lahir PGRI sebagai Hari Guru Nasional berdasarkan Keputusan Presiden No.78/1994.

Belakangan, semangat mengesampingkan perbedaan suku, agama, ras, dan politik meluntur di kalangan pendidik. Akhir bulan lalu, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta merilis hasil survei nasional berjudul *Pelita Yang Meredup: Potret Keberagaman Guru Indonesia*. Survei pada 6 Agustus sampai 6 September 2018 yang mengambil sampel dari 2.237 guru di seluruh Indonesia, 32 di antara mereka guru di DIY, menunjukkan para pendidik semakin menutup diri dari kebinekaan.

HARI GURU NASIONAL 2018

▶ Halaman 5

Guru Menjauh...

Survei tersebut menyatakan guru di Indonesia, mulai dari TK sampai SMA dan sederajat, memiliki opini intoleran serta opini radikal yang tinggi.

Sebagai contoh, 56% guru tidak setuju memusnahkan sekolah-sekolah berbasis agama di sekitar mereka.

Tak sekedar opini, sikap intoleran mereka juga mewujud dalam tindakan nyata. Sebanyak 34% guru berkeinginan menandatangani petisi menolak pendirian sekolah berbasis agama non-Islam di sekitar tempat tinggal mereka.

Dalam ihwal radikalisme, 33% guru setuju mengizinkan orang lain ikut perang mewujudkan negara Islam. Dalam intensi aksi radikal, sebanyak 27,59% guru ingin mengizinkan orang lain perang mewujudkan negara Islam. Bahkan 13,30% guru punya keinginan menyerang polisi yang kerap menangkap orang-orang yang beraqidah mendirikan negara Islam.

Selalu Umam, Direktur Eksekutif PPM Jakarta kala itu mengatakan ada tiga faktor dominan yang memengaruhi tingkat opini dan intensi aksi intoleransi dan radikalisme guru. Pertama, pandangan Islamis. Sebanyak 40,36% guru menganggap seluruh ilmu pengetahuan sudah ada dalam Alquran, sehingga tidak perlu mempelajari ilmu-ilmu yang besumber dari Barat. Kedua, faktor demografi. Guru yang tinggal di lingkungan homogen cenderung intoleran. Guru TK juga lebih intoleran dibandingkan dengan guru di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Perubahan Kurikulum

Mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga Amin Abdullah mengatakan guru intoleran dipengaruhi faktor eksternal dan internal.

Faktor eksternal berupa pergeseran kondisi politik Indonesia, salah satunya perubahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi.

"Sekarang jadi muncul perdebatan sehingga politik yang memecah belah itu membayangi guru," kata dia, Sabtu (24/11).

Politik yang melibatkan agama sudah menjadi moarak bagi kalangan pendidik. Mereka yang tidak sejalan dengan politik dengan identitas agama takut dianggap menyimpang.

Sementara, faktor internal yang menjadi penyebab guru intoleran adalah komposisi pelajaran Pancasila dengan pelajaran agama yang jomplang. Pelajaran Pancasila yang menanamkan nilai kemanusiaan seperti solidaritas, inklusifitas, dan toleransi semakin harus

Komposisi ini tidak hanya terjadi saat guru praktik di kelas tetapi sudah tertanam sejak ia menjadi mahasiswa. Akibatnya, guru tidak terlatih untuk bertoleransi kepada orang lain.

Amin mengusulkan adanya perubahan kurikulum. Komposisi Pancasila dengan agama harus dibalik atau setidaknya dirancang menjadi 50:50.

Ibarat pepatah guru kencing berdiri murid kencing berlari, guru yang intoleran sangat memengaruhi pembentukan karakter siswa. Ideologi yang dimiliki guru-guru kemungkinan akan ditularkan kepada peserta didiknya dan ini seharusnya menjadi perhatian besar.

Menurut Amin, praktik intoleransi banyak berhasil ditanamkan di level PAUD atau SD karena pada usia itu anak-anak belum memiliki daya pikir kritis.

"Guru di tingkat bawah [sekolah dasar] bisa lebih keras dibandingkan dengan guru di tingkat SMA atau perguruan tinggi yang siswanya sudah bisa mengkritik. Makanya cara berpikir [guru intoleran] harus dirombak, terutama guru tingkat dasar," kata pria yang menjadi Ketua Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada periode 1995-2000 ini.

Adapun Kepala Laboratorium Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Halli yang juga menjadi Direktur Riset Setara Institute mengatakan negara harus memberikan kekebalan kepada guru yang belum terpapar pandangan intoleran. Wawasan kebangsaan harus diberikan secara intens.

Sementara, guru yang terpapar intoleransi harus ditangani dalam jalur yang berbeda, tergantung status kepegawaianya.

Guru yang menjadi pegawai negeri sipil sudah terikat sumpah jabatan dan dituntut untuk setia kepada negara serta Pancasila.

"Ia [sumpah] ditepakan saja. Guru diproses melalui sidang etik agar bisa diberi sanksi berjenjang. Kasih elek jera karena kalau tidak, penyelewengan akan lebih tinggi," kata dia.

Sementara, guru-guru swasta perlu ditinjau ulang wawasan kebangsaannya. Pembinaan wawasan kebangsaan perlu dijadikan agenda rutin dan reguler sehingga para guru mengikuti update informasi dan masalah-masalah kebangsaan yang sedang terjadi.

Halli mengatakan banyak sekolah yang belum memiliki wawasan kebangsaan. Hal ini bisa menjadi langkah preventif maupun kuratif dalam menangani masalah intoleransi.

Dewan Etik

Di tingkat organisasi profesi, tidak ada jalur yang bisa menghukum guru intoleran. Ketua PGRI Kota

Akibatnya, jika ada kasus-kasus yang melibatkan guru, misalnya masalah intoleransi, PGRI belum bisa memberikan peran besar.

"Jadi kami hanya memberikan imbuhan agar jangan sampai guru melakukan pelanggaran etik," ucap dia belum lama ini.

Perspektif soal toleransi juga belum sepenuhnya dipahami. Sogeng mempertanyakan definisi intoleransi. Dia menilai ada ambiguitas dalam konsep ini dengan mengambil contoh yang kurang relevan, yakni sekolah yang mengatur pakaian wanita harus di bawah lutut.

"Apakah hal itu bentuk intoleransi? Konteks seperti ini bukan bentuk intoleransi jika dilihat aturan tersebut diberikan kepada siswa yang cukup umur. Ini perlu diturunkan," kata dia.

Guna menjerahkan problem ini, kata dia, perlu dibentuk Dewan Etik.

"Kalau ada Dewan Etik, kita bisa menilai apakah kebijakan atau aturan yang dikeluarkan guru layak atau tidak. Ini tidak hanya masalah intoleransi, tetapi semua kasus yang melibatkan guru. Seperti adanya kasus kekerasan dan lainnya," ucap dia.

Adapun Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY Kadamanta Baskara Aji belum mengetahui secara detail penelitian ihwal tingginya opini intoleransi di kalangan guru.

Aji menegaskan Disdikpora belum pernah menemukan adanya guru di DIY yang mengajarkan intoleransi. Bahkan, dia mengklaim guru di DIY menjadi benteng masuknya intoleransi di kalangan siswa.

"Dalam berbagai kesempatan kami selalu mengingatkan kepada guru, sekolah agar selalu mengajarkan toleransi kepada anak, termasuk menanamkan nilai kebangsaan," kata dia.

Pemangku kepentingan di kabupaten dan kota di provinsi ini juga mengklaim tidak ada guru yang intoleran. "Kalau ada guru intoleran, kami akan memproses sesuai kewenangan," kata kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja.

"Insyallah di Sleman itu cukup tinggi toleransi terhadap antar umat beragama. Berbagai cara kami tempuh untuk membentuk guru yang toleran," kata Ketua PGRI Sleman Sudjito.

"Kalau yang saya tahu, saya dengar dan saya rasa tidak ada [guru intoleran], aman-aman saja Gunungkidul," ujar Kepala Disdikpora Gunungkidul, Kajiyo Satrio.

Gumungkidul Bahron Rasyid. "Kami belum tahu soal itu [penelitian ihwal guru intoleran] sebab di sini tidak ada," ucap Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Disdikpora Kulonprogo Rohyatun Budi Respati.

"Di Kulonprogo masih aman [tidak ada guru intoleran]," ujar Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Disdikpora Kulonprogo Rohyatun Budi Respati.

Padahal, penelitian PPM UIN

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005